

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Cross, Rupert. *Precedent in English Law* (Oxford: Clarendon Press, 1977).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dimiyati, Khudzaifah. dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2004.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta, Penerbit Kencana, 2013.
- Erwiningsih, Winahyu. dan Fakhriyasa Zalili Sailan. *Hukum Agraria Dasar-Dasar dan Penerapannya di Bidang Pertanahan*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fauzan, Uzair. dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hajati, Sri., Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, dan Oemar Moechtar. *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Isnaini. dan Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima, 2022.

Kuncorowati, Puji Wulandari. dan Suripno. *Diktat Hukum Agraria*.

Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Pound, Roscoe. *Jurisprudence: Volume 1*. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1959.

Radbruch, Gustav. *Philosophy of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1950.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

B. Jurnal

- Amir, Arivan. "Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019): 51-65.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135-149.
- Idayanti, Soesi, dan Fajar Dian Aryani. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian *E-Logistics*." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no 1 (2019): 68-81.
- Ikhwan, Mufarrijul. "Prinsip Itikad Baik Dalam *Rechtsverwerking* Pada Hukum Agraria Indonesia," *RechtIdee* 17, no. 1 (2022): 179-204.
- Ismail, Nurhasan. "Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 33-51.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41-56.
- Khoirunnisa, Ira, Benita Setya Putri, dan Nur Laili Nikmah. "Hak Prioritas Terhadap Perolehan Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom*." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12102-12109.
- Kurniawan, Irman Widi, Etty Mulyati, dan Betty Rubiati. "Analisis Yuridis Hak *Eigendom* Verponding Sebagai Jaminan Kebendaan." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 38-55.

Putri, Thalia Dwi Aisyah, dan Indri Fogar Susilowati. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 109 Pk/Pdt/2022 Terkait Penguasaan Tanah Bekas *Eigendom* Verponding." *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 3 (2023): 91-103.

Rosadi, Edi. "Putusan Hakim yang Berkeadilan." *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 381-400.

Salsabila, Amanda Khoirunnisa Etty Haryati Djukardi, dan Yani Pujiwati, "Studi Kasus terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2022 dalam Kasus Dago Elos Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Terkait." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 96-110.

Sanjaya, I Made Setiana, I Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani. "Akibat Hukum Konversi Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 282-287.

Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53-70.

Sari, Ika Sistia Wulan. dan Sri Setyadi. "Kedudukan Hukum Pemegang Hak atas Tanah *Eigendom* Verponding dalam Penguasaan Tanah oleh Pemerintah." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, No. 1 (2022): 316–330.

Sutanto, Pedro. “Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Bekas *Eigendom* Verponding dalam Sengketa Kepemilikan Tanah.” *Jurnal Dialektika Hukum* 4, No 2 (2022): 91-123.

Syukur, Amalia Nurfitria, Hajriyanti Nuraini, dan Yusmiati Yusmiati. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Warga Dago Elos Melawan Keluarga Muller: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no 1 (2022): 51-72.

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41-63.

Usman, Abdul Hamid. "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 60-76.

C. Disertasi / Tesis

Pasaribu, Esther Naomi. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*” (Tesis Program Magister, Universitas Kristen Indonesia, 2019).

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-
ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah
Asal Konversi Hak-Hak Barat.

E. Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 570/PDT/2017/PT.BDG.

Putusan Kasasi Nomor: 934 K/Pdt/2019

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
109/PK/Pdt/2022.